



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UNIT KERJA : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : HENDRA AH
- Jabatan : KEPALA DINAS
- NHK : 489476

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	100.000.000
1. MOBIL, SUZUKI RS 415 SWIFT ST(4X2) SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	11.973.288
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	511.973.288

**III. HUTANG** Rp. 38.144.779

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 473.828.509

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

**UNIT KERJA** : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HERRY NURDY, SE, M.SI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 437769

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>60.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>210.000.000</b>
1. MOBIL, DAIHATSU ROCKY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>9.000.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>279.000.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>279.000.000</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**UNIT KERJA** : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ZULFIKAR SYAFARI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 713096

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>50.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>127.000.000</b>
1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. MOTOR, HONDA HONDA SCOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.000.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>187.000.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>100.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>87.000.000</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**UNIT KERJA** : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : LILI DIANA FITRI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 844218

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 3 m2/14 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , Rp. 400.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	----
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	1.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	401.000.000

**III. HUTANG** Rp. 98.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 303.000.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**UNIT KERJA** : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **WILLY PRAMESWANTO**  
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**  
3. NHK : **491322**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>564.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 564.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>532.600.000</b>
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.600.000		
3. MOBIL, MITSUBISHI MOPEN/MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 445.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>19.874.710</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.116.474.710</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.116.474.710</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara





Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

**UNIT KERJA** : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : ERWANSYAH
- Jabatan** : SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
- NHK** : 438312

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>700.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 7 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , Rp. 700.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>120.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>13.056.095</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
Sub Total	<b>Rp.</b>	<b>833.056.095</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>219.300.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>613.756.095</b>

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UNIT KERJA : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : AKHMAD SUPRIYANTO
- Jabatan : KEPALA SEKSI PENGENDALI OPERASI DAN KOMUNIKASI
- NHK : 668859

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 550.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/154 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 162.000.000

- MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S (F700RE-GMMFJ) Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
- MOTOR, HONDA NC12A1CF A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
- MOTOR, YAMAHA B65 SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO 160 VARIO 160 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 24.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 103.000.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 157.085.979

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 972.085.979

**III. HUTANG** Rp. 30.201.785

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 941.884.194

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

**UNIT KERJA : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **WISNU**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMADAMAN DAN INVESTIGASI**
3. NHK : **55097**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>125.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>23.800.000</b>
1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.800.000		
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>104.500.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>43.349</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>253.343.349</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>253.343.349</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

**UNIT KERJA : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **DICKY KURNIAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA**
3. NHK : **876291**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 15.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 335.000.000**

1. MOBIL, NISSAN MPV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. ----**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 100.000**

**F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----**

**Sub Total** **Rp. 350.100.000**

**III. HUTANG** **Rp. 200.000.000**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 150.100.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**UNIT KERJA** : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ENDAH YUNI ASTUTI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 491629

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>820.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 239 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>20.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.500.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.828.309</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>847.328.309</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>200.383.355</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>646.944.954</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.